

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti serorang professional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya.¹

Di Indonesia salah satu profesi yang dituntut professional dalam menjalankan profesinya adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.² Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup notaris meliputi kebenaran materiil , dapat dibagi menjadi empat poin:

1. Tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya

¹ Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga kenotariatan Indonesia; Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, Hal.29.

² Supriadi, 2006, *Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.29.

2. Tanggung Jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya
3. Tanggung Jawab Notaris berdasar Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.³

Mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta otentik. Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi pada perbuatan perdata atau pidana terjadi apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris terhadap akta otentik yang memuat keterangan palsu (Pasal 84 UUD).

Menurut R. Sugandhi keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan sesungguhnya.⁴ Jadi yang dimaksud dengan akta otentik yang memuat keterangan palsu dalam hal ini adalah notaris secara sengaja atau tidak disengaja, notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap membuat akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan

³ Lihat Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for documentation and studies of business law, dikutip dari: Abdul Ghofur A, Op.cit, Hal.34.

⁴ Lihat Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, dikutip dari: R Sugandhi, Op.cit, Hal.7.

pihak atau penghadap tertentu saja dimana keterangan itu melanggar kepentingan orang lain.

Salah satu contoh kasus yang menimpa notaris seperti dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual-Beli dan Akta Jual-Beli beberapa bidang tanah milik dari tuan Novianto Xaverius Palenkahu dengan pembeli tuan Amang Suratman Umar yang dibuat dihadapan notaris Rachman Arie Soetardjo, SH. Yang setelah diperiksa di pengadilan ternyata akta-akta tersebut dibuat secara sepihak oleh tuan Amang Suratman Umar dengan cara memaksa tuan Novianto Xaverius Palenkahu untuk menandatangani blanko-blanku kosong. Dalam kasus ini notaris Rachman Arie Soetardjo,SH, berperan membuat dan mengesahkan blanko-blanku kosong Akta Pengikatan Jual-Beli dan Akta Jual-Beli yang di sodorkan oleh tuan Amang Suratman Umar yang telah ditandatangani kedua belah pihak sebelumnya tanpa sepengetahuan tuan Novianto Xaverius Palenkahu.

Berdasarkan pemaparan di atas, Seorang notaris diharapkan selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, namun dalam realisasinya saat ini, keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih terdapat notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tersebut. Pemahaman yang kurang komprehensif dari aparat penegak hukum serta para pihak yang tidak puas terhadap pelayanan notaris dan produk hukum notaris seringkali juga membuat notaris dalam

menjalankan jabatan diproses hukum ke ranah pidana.⁵ Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU DITINJAU DARI UUD NO.2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang memuat keterangan palsu?
2. Bagaimana keabsahan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris jika memuat keterangan palsu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang memuat keterangan palsu.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris jika memuat keterangan palsu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta

⁵ Mulyoto, 2011, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta : Cakrawala Media, Hal .39.

otentik yang dibuat dihadapan notaris dan keabsahan akta otentik jika memuat keterangan palsu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Pertanggung jawaban Notaris merupakan hal yang sangat penting dan mendasar mengingat akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan bukti yang kuat sebagai bukti tertulis. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Menurut Subekti (2005:25) yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Apabila dilihat dari pertanggungjawaban pejabat dalam melaksanakan jabatannya. Kranenburg dan Vegtig menyebutkan ada dua landasan dalam pertanggungjawaban pejabat dalam menjalankan jabatannya:⁶

1. Teori *Fautes Personalis*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab akan dibebankan pada pejabat itu sendiri jika karena menjalankan jabatannya, pejabat tersebut merugikan pihak ketiga, dengan kata lain pembebanan tanggung jawab ini akan dibebankan kepada manusia selaku pribadi.

⁶ HR.Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal .365.

2. Teori *Fautes De Service*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab terhadap kerugian bagi pihak ketiga akan dibebankan kepada instansi dimana pejabat tersebut melaksanakan jabatannya.

Kedua perbedaan yang mendasar dalam pertanggungjawaban jabatan diatas adalah, dimana dalam teori *Fautes Personalies* telah terjadi suatu kesalahan pribadi dalam menjanjikan jabatannya sebagai bagian dari pemerintah tetapi bukan berkaitan dengan pelayanan publik, dengan kata lain kesalahan tersebut bersumber dari seseorang yang berfungsi sebagai pejabat negara dalam hal kurang hati-hati atau kelalaiannya. Sedangkan dalam teori *Fautes De Service* dapat dibebankan karena adanya penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang memuat keterangan palsu, apabila ditinjau dari pendapat Kranenburg dan Vegtig, maka dapat digolongkan dalam Teori *Fautes Personalis*, dimana notaris sebagai pejabat negara atau bagian dari pemerintah karena kurang hati-hati atau kelalaiannya menyebabkan tidak terjaganya kerahasiaan suatu minuta akta yang disebabkan oleh penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta tersebut oleh pekerjanya. Penelitian tentang pertanggungjawaban Notaris merupakan penelitian dapat dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang pertanggungjawaban Notaris. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang dibuat Berdasarkan Keterangan dan Dokumen Palsu” oleh Steven

Winarso, Tesis Universitas Airlangga Surabaya 2009, menggunakan metode yuridis normatif, dengan rumusan masalah Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat.

2. Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak” oleh Putu Vera Purnama Diana Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2015 dengan rumusan masalah Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat.
3. Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya ” oleh Mukham Arief Widodo Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang Tahun 2015 dengan rumusan masalah Apakah notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pkerjanya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni berfokus pada peraturan yang tertulis

(*law in book*)⁷. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini se jelas mungkin tentang bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik jika memuat keterangan palsu.

3. Bentuk dan jenis Data

Bentuk Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan Prof. Moeljatno, S.H.
- 4) Peraturan Jabatan Notaris (PjN)

b. Bahan hukum sekunder:

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 287/Pdt.G/2014/PN.Skt

4. Metode Pengumpulan Data

⁷ Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi ke-1 Cet IV*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, Hal. 118.

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah studi kepustakaan dan wawancara terhadap Dosen atau Notaris yang ada di kota Karanganyar dan Solo untuk mengetahui pendapat mereka tentang Pertanggungjawaban Notaris apabila melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuatnya berdasarkan UU No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah dengan menerapkan analisis secara kualitatif, dengan memperhatikan penafsiran gramatikal, yakni mendasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dan kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori yang di peroleh dari studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literature dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditrik kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian, maka penulis menyusun sistematika penelitian ini sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar pustaka. BAB II: Berupa Tinjauan Pustaka yang didalamnya akan diuraikan mengenai beberapa landasan teoritis sebagai berikut : Landasan Profesi Jabatan Notaris, Kewenangan dan Kewajiban Notaris Membuat Akta Otentik, Teori Pertanggungjawaban, Syarat Akta

Notaris Sebagai Akta Otentik. BAB III : Hasil Penelitian Dan
Pembahasan. Dan BAB IV : Kesimpulan & Saran, DaftarPustaka